

Pengaruh Jumlah UMKM Dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Terhadap Penerimaan Pajak

Norman Duma Sitinjak

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang
noma1274@gmail.com

Abstract

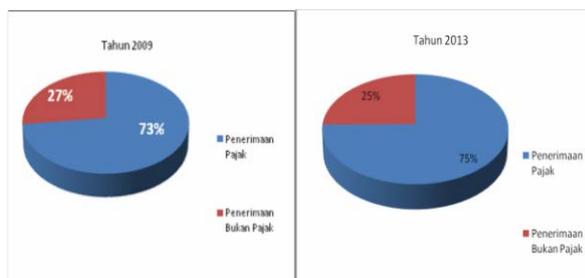
This study examines the effect of the number of MSMEs and the growth of labor to tax revenue. This research finds that the number of MSMEs has a significant effect on tax revenue. The higher the number of MSMEs, the higher the tax revenue. The growth of labor has no effect on tax revenue.

Keywords: MSMEs, Labor Growth, Tax Revenues

<https://doi.org/10.26905/jmdk.v6i1.2065>

PENDAHULUAN

Seperti kita ketahui, negara membutuhkan dana untuk menyelenggarakan pemerintahan, dimana sumber dana terbesar berasal dari pajak. Berdasar data BPS tahun 2017 dari tahun ke tahun kontribusi pajak terhadap penerimaan negara semakin besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi pajak yang utama semakin dapat diterapkan, yaitu sebagai sumber penerimaan negara.



Gambar 1. Kontribusi Pajak Terhadap Penerimaan Negara
Sumber: BPS, 2017

Pemerintah selalu berupaya untuk menjaga stabilitas pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Upaya tersebut diantaranya adalah peningkatan lapangan pekerjaan dan mendorong tumbuhnya UMKM. Peningkatan lapangan pekerjaan dan tumbuhnya UMKM akan meningkatkan

daya konsumsi masyarakat, yang selanjutnya akan meningkatkan produksi barang dan jasa oleh industri besar sehingga Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pajak (WP) Badan meningkat.

Kontribusi pajak dari WP badan diharapkan dapat selalu meningkat. Penyebabnya adalah karena kontribusi PPh dari WP badan terhadap penerimaan pajak sebesar 77,11% sedangkan dari WP orang pribadi sebesar 22,89% (Mulyani, 2009). Secara langsung kontribusi WP orang pribadi kecil akan tetapi WP orang pribadi menjadi penggerak utama tidak langsung terhadap PPh Badan dan PPN.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menguji variabel UMKM dan pengaruh pertumbuhan tenaga kerja terhadap variabel penerimaan pajak. Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk menganalisis pengaruh jumlah UMKM terhadap penerimaan pajak, 2) Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan tenaga kerja terhadap penerimaan pajak

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai informasi dalam melakukan analisis maupun merumuskan kebijakan terkait penerimaan pajak

Tinjauan Pustaka

Pajak

Pajak merupakan kontribusi kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan pembiayaan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (www.pajak.go.id, 2012). Maksudnya adalah orang pribadi dan badan yang telah memenuhi ketentuan UU Perpajakan memiliki kewajiban perpajakan. Karena pajak berlandaskan oleh UU maka pajak bersifat memaksa walaupun pembayar pajak tidak mendapatkan kontribusi langsung. Pajak yang dibayar sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional.

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: 1) Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat; 2) Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. (www.pajak.go.id, 2012). Pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Meterai

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 1 yang dimaksud dengan UMKM adalah: 1) Usaha mikro adalah usaha produktif sesuai dengan kriteria dalam UU UMKM; 2). Usaha kecil adalah usaha produktif yang bukan anak atau cabang usaha menengah atau usaha besar; 3) Usaha menengah adalah usaha produktif yang mandiri dan bukan merupakan anak atau cabang usaha kecil atau usaha besar dengan kekayaan bersih atau besaran penjualan sesuai dengan UU UMKM. Adapun kriteria jumlah aset usaha mikro, kecil dan menengah bisa dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Kriteria UMKM

No	Usaha	Kriteria	
		Aset (juta rupiah)	Omzet Bruto (juta rupiah)
1	Mikro	≤ 50	≤ 300
2	Kecil	> 50 - 500	> 300 - 2.500
3	Menengah	> 500 - 10.000	> 2.500 - 50.000

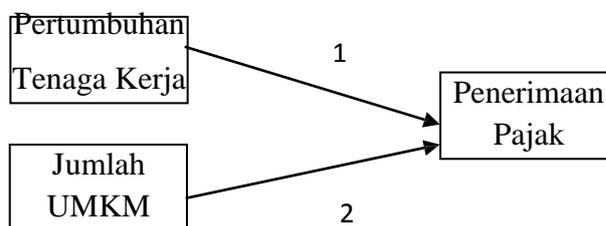
Tenaga Kerja

Pada penelitian ini definisi tenaga kerja menggunakan kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu penduduk dengan usia lima belas tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama (www.bps.go.id, 2018). Lapangan pekerjaannya terdiri dari

1. Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri
4. Listrik, gas, dan air minum
5. Konstruksi
6. Perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi
7. Transportasi, pergudangan dan komunikasi
8. Lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan
9. Jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan

Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Sumber kerangka konsep penelitian: Rustiono (2008) dan Kibassa (2012)

METODE

Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut

H₁ : Jumlah UMKM berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak

H₂ : Pertumbuhan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak

Sumber Data

Sumber data adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari objeknya. Data tersebut meliputi:

- Pertumbuhan jumlah tenaga kerja
- Jumlah UMKM
- Penerimaan pajak

Sejak tahun 1997 sampai dengan 2016 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik melalui www.bps.go.id.

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik dengan metode regresi linear berganda

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas, dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PTK	.904	1.107
	JUMKM	.904	1.107

Sumber : data diolah

Hasil VIF dari kedua variabel lebih kecil dari 5 sehingga dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas pada kedua variabel bebas tersebut.

Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi, dapat dilihat pada tabel 3

Tabel 3. Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	.486

Sumber : data diolah

a. Predictors: (Constant),

JUMKM, PTK

b. Dependent Variable: PenPjk

Nilainya sebesar 0,486. Nilai d_L dan d_U dapat dilihat pada Tabel DW dengan tingkat signifikansi (*error*) 5% ($\alpha = 0,05$), jumlah variabel bebas $k = 2$ dan jumlah sampel $n = 17$.

Tabel Durbin-Watson menunjukkan nilai $d_L=1,015$ dan nilai $d_U=1,536$. Dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi linier terjadi Autokorelasi positif.

Untuk mengatasi masalah Autokorelasi digunakan metode uji runs test.

Hasil uji runs test ada pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Uji Run Test

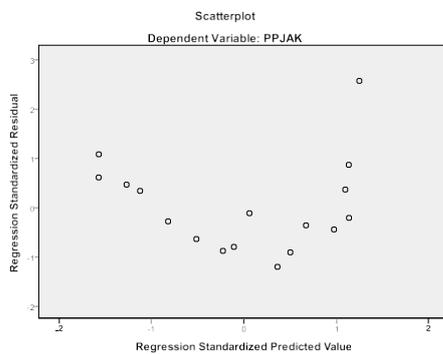
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-3.54392
Cases < Test Value	8
Cases >= Test Value	9
Total Cases	17
Number of Runs	5
Z	-1.997
Asymp. Sig. (2-tailed)	.046
a. Median	

Sumber : data diolah

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada Tabel 5. runs test adalah $>0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala Autokorelasi.

Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 2.

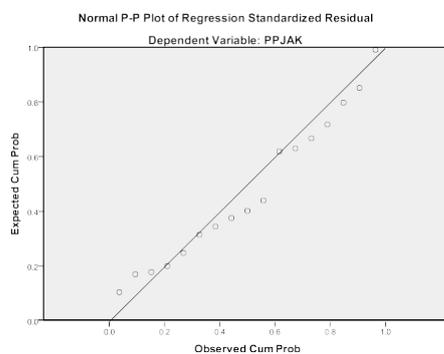


Gambar 2. Scatterplot
Sumber : data diolah

Dari gambar 2 dapat diketahui sebaran titik tidak membentuk suatu pola/alur tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Normalitas

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar 3 :



Gambar 3. Normal P-P Plot
Sumber : data diolah

Sebaran titik-titik pada gambar 3 relatif mendekati garis lurus, sehingga disimpulkan bahwa residual terdistribusi dengan normal

Uji Kelayakan Model

Uji F

Pada tabel 5 diketahui nilai prob. F hitung (sig) sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga model regresi linier yang diestimasi layak digunakan.

Tabel 5. ANOVA^b

Model		F	Sig.
1	Regression	58.774	.000 ^a
	Residual		
	Total		

a. Predictors: (Constant), JUMKM, PTK

b. Dependent Variable: PenPjk

Sumber : data diolah

Uji Koefisien Regresi (Uji t)

Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini :

Tabel 6. Coefficients^a

Model		Sig.
1	(Constant)	.000
	PTK	.000
	JUMKM	.885

a. Dependent Variable: PenPjk

Sumber : data diolah

Pada tabel 6 diketahui nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 hanya pada variabel JUMKM, sedangkan variabel PTK memiliki signifikansi diatas 0,05. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah UMKM berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan pajak.

Koefisien Determinasi

Tabel 7. Model Summary^b

Model	R Square	Adjusted R Square
1	.894	.878

a. Predictors: (Constant), JUMKM, PTK

b. Dependent Variable: PenPjk

Sumber : data diolah

Berdasarkan R Square pada tabel 7 dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan tenaga kerja dan jumlah UMKM memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak sebesar 89,4%, sisanya oleh variabel lain yang tidak ada dalam model regresi linier.

Pembahasan

Pada tabel 7 dapat diketahui bahwa jumlah UMKM memiliki nilai signifikansi positif sebesar 0,000 yang berarti jika jumlah UMKM mengalami peningkatan maka penerimaan pajak juga meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian Kibassa (2012) yang menjelaskan bahwa UMKM memberikan kontribusi yang tinggi terhadap penerimaan pajak. UMKM di Indonesia memiliki peran yang kuat terhadap perekonomian rakyat. Sebagai contoh, UMKM terbukti dapat bertahan saat krisis moneter pada tahun 1997, sedangkan usaha yang lebih besar banyak yang mengalami kebangkrutan.

Menyadari peranan UMKM terhadap perekonomian Indonesia, pemerintah melakukan perbaikan termasuk aspek peraturan maupun prosedur perizinan dan biaya kemudahan berusaha di Indonesia terutama untuk UMKM (Humas EKON dan Tim PKP Kemkominfo, 2016). Selain itu pemerintah juga melakukan bantuan pendanaan untuk UMKM melalui variasi pendanaan (Kementerian Keuangan, 2016). Dari segi perpajakan, pemerintah juga memberikan kemudahan bagi UMKM dalam bentuk penyederhanaan tarif pajak, kemudahan pembayaran dan pelaporan pajak dengan menerbitkan PP 46 Tahun 2013.

Tidak signifikannya peranan pertumbuhan tenaga kerja terhadap penerimaan perpajakan di Indonesia bukanlah suatu kejutan. Pemerintah bahkan selalu menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP telah dinaikkan lima kali sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2017. Dampak secara langsung dari kenaikan PTKP adalah menurunnya penerimaan pajak dari WP Orang Pribadi, akan tetapi akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga secara tidak langsung penerimaan pajak dari PPh WP Badan dan terutama PPN mengalami peningkatan. Seperti yang dijelaskan Wahyu dan Valencia (2016) bahwa penyebab utama kurangnya penerimaan pajak adalah karena kecilnya penerimaan dari PPN untuk itu PTKP perlu dinaikkan.

Kesimpulan

Dari hasil analisa dapat disimpulkan beberapa hal yaitu : 1) Jumlah UMKM memiliki peran yang signifikan dalam peningkatan penerimaan pajak; 2) Pertumbuhan tenaga kerja tidak mempengaruhi penerimaan pajak; 3) Agar pertumbuhan tenaga kerja memiliki peran bagi penerimaan pajak maka pemerintah menaikkan PTKP sehingga daya beli masyarakat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2018). Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/16/970/penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-lapangan-pekerjaan-utama-1986---2017.html> tanggal 08 Maret 2018
- BPS. (2018). Realisasi Penerimaan Negara. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-penerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2017.html> tanggal 07 Maret 2018
- Humas EKON Paket Kebijakan Ekonomi XII. (2016). Pangkas Izin, Prosedur, Waktu, dan Biaya Untuk Kemudahan Usaha. Diakses melalui https://kominformo.go.id/content/detail/7401/paket-kebijakan-ekonomi-xii-pangkas-izin-prosedur-waktu-dan-biaya-untuk-kemudahan-usaha/0/artikel_gpr tanggal 09 Maret 2018
- Kementerian Keuangan. (2016). Dukungan Pemerintah dalam Pembiayaan UMKM “Mengawal Nawacita, Wujudkan Indonesia Sejahtera”. Workshop Sistem Informasi Kredit Program Surabaya, 3 Maret 2016.
- Kibassa, F. M. (2012). “The Role Of Small And Micro Enterprises (Smes) On Government Revenue.” *Journal of Economics and Sustainable Development*, 3(8).

- Mulyani, S. (2009). Kontribusi PPh Pribadi Cuma 22,9%. Diakses melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/1076342/kontribusi-pph-pribadi-cuma-229> tanggal 07 Maret 2018.
- Rustiono, D. (2008). “Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah”. Universitas Diponegoro. Semarang
- Wahyu dan Valencia. (2016). Apakah Menaikkan PTKP Tindakan Tepat untuk Mendorong Pendapatan Pajak? Diakses melalui <https://news.detik.com/opini/3200413/apakah-menaikkan-ptkp-tindakan-tepat-untuk-mendorong-pendapatan-pajak> tanggal 10 Maret 2018
- www.pajak.go.id. (2012). Belajar Pajak. Diakses melalui <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak> tanggal 09 Maret 2018